

Kampus Merdeka, Kebebasan yang Menantang

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim baru saja mengeluarkan arah kebijakan 'Kampus Merdeka' dalam mengelola perguruan tinggi. Ada tiga hal yang ditekankan. Yaitu: mahasiswa dapat mengambil kuliah diluar prodi, kebebasan akreditasi, dan pembukaan prodi baru.

Mahasiswa dari suatu program studi (prodi) dapat menyelesaikan program sarjana mereka (S1) dengan mengambil kuliah di luar prodinya maksimal 3 semester. Misalnya, mahasiswa yang kuliah Bahasa Inggris S1 di UGM, ia dapat mengambil kuliah atau tugas di luar prodinya di Amerika, di Inggris, di Singapura. Dengan kata lain prodi Bahasa Inggris UGM hanya perlu mengelola program 5 semester. Sedangkan lainnya dikelola bersama dengan pihak luar atau bahkan diserahkan penuh pada pihak luar. Nantinya ia tetap sarjana Bahasa Inggris UGM.

Dengan kebebasan model ini diharapkan bahwa lulusan S1 kita memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas dari tempat lain. Dengan demikian lulusannya nanti akan lebih siap bekerja. Karena sudah punya pengalaman belajar dan bekerja di tempat lain terkait dengan bidang studi mereka.

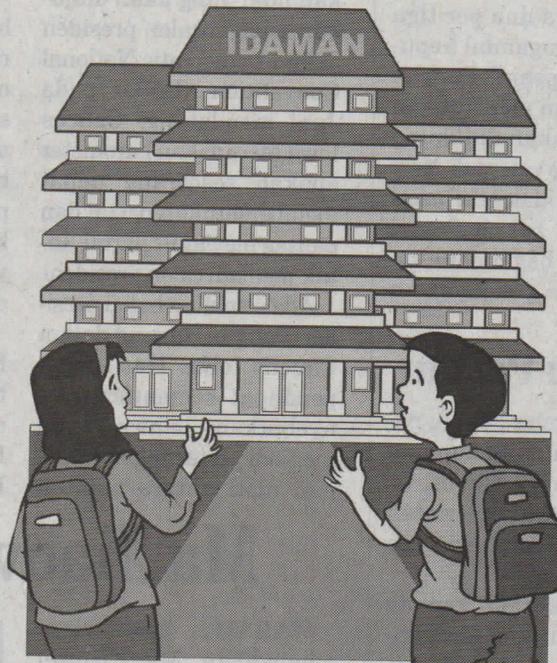
Akreditasi Sukarela

Persoalan yang menonjol dengan akreditasi prodi dan institusi adalah persiapan dan formalitasnya yang begitu rumit dan menuntut waktu dan tenaga banyak. Hampir semua institusi termasuk prodi yang mempersiapkan akreditasi mengerahkan semua SDM mereka baik dosen, pegawai, dan mahasiswa untuk kerja lembur. Sesudah siap kadang tidak dapat langsung dinilai asesor karena banyaknya institusi yang harus dinilai.

Cara baru yang dihembuskan adalah

Paul Suparno SJ

akreditasi itu sukarela. PT dapat mencari akreditasi luar yang diakui internasional dan langsung akan diakui pemerintah. PT yang ingin cepat diakreditasi dapat dilayani cepat, sedangkan yang ingin tetap dalam keadaan awalnya da-



KR-JOKO SANTOSO

pat diperpanjang saja.

Program 'Kampus Merdeka' menawarkan PT yang akreditasinya A atau B boleh membuka prodi baru sendiri tanpa persyaratan ketat dari pemerintah. Namun tetap ada aturan yang harus dipenuhi antara lain ada kerja sama dengan PT luar negeri yang baik, perusahaan internasional yang baik, atau lembaga profesi yang baik. Harapannya dengan pembukaan prodi yang bebas ini PT dapat memilih prodi mana yang dianggap dapat memberi peluang kerja bagi lulusannya ke depan. Jelas ini menuntut kerja sama yang bagus dari PT kita dengan PT LN dan lembaga lain di luar negeri yang unggul.

Keuntungan dengan program 'Kampus Merdeka' itu adalah dimungkinkan PT lebih bebas mengembangkan dirinya, tidak selalu dikurung oleh aturan ketat pemerintah. PT yang sudah kuat, yang mempunyai SDM kuat dan punya kreatifitas mengembangkan diri akan dapat cepat berkembang tanpa dihambat oleh peraturan yang ada. Namun untuk PT yang kurang kuat, kurang SDM, yang berbeban berat menyelesaikan persoalan didalam sendiri, akan sungguh sulit untuk mengembangkan diri dan akan ketinggalan.

Mencermati

Program 'Kampus Merdeka' membutuhkan SDM yang terbuka, kreatif, yang mau berpikir luas, yang tidak terkungkung dalam PTnya sendiri. Program ini menuntut pengelola PT yang terbuka, inovatif, berpikir luas. Juga sadar bahwa pendidikan di PT pun harus dilakukan dalam kerja sama dengan berbagai pihak.

Yang dibutuhkan ke depan secara nyata adalah PT mau mencermati bidang apa yang

memang dibutuhkan dalam lapangan kerja kedepan. Disini diperlukan kesadaran untuk memilih prodi yang relevan di zaman revolusi industri 4.0 ini.

Gagasan baru 'Kampus Merdeka', memberikan kebebasan PT mengembangkan diri tanpa banyak hambatan pemerintah. Kebebasan ini tidak selalu mudah karena kita sudah biasa kerja aman dalam prodi dan PT kita masing-masing. Maka kebebasan ini menjadi tantangan bagi kita semua yang berkarya di PT, apakah kita sungguh menggunakan kebebasan untuk semakin maju. □ - g

Prof Dr Paul Suparno SJ,
Guru besar Universitas Sanata Dharma